

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI DALAM HARTA

BERSAMA PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA

SUNGGUMINASA KELAS 1B



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

EMA FEBRIANTI

NIM: 10100114239

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ema Febrianti
Nim : 10100114239
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 12 Agustus 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan/SI
Fakultas/program : Syariah Dan Hukum/SI
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 April 2018

Penyusun,



Ema Febrianti

NIM: 10100114239

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI DALAM HARTA BERSAMA PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB ”, yang disusun oleh Ema Febrianti, NIM: 10100114239, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Mei 2018 M
15 Ramadhan 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.

Munaqisy I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tiada terputus dari kedua orang tua yang tercinta, ayahanda **Baharuddin**, dan ibunda **Menati**, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan adil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materi, bahasa maupun sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak

terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan bantuan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhinggaterutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.H.I.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik dari pihak Pengadilan Agama Sungguminasa beserta jajarannya yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh sahabat-sahabat di UIN Alauddin Makassar terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
8. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2014 Khususnya **Syarifah Alisha Nadya, Rizki Istitah, Irmayanti Sidang, Rafida Azis, Ayu Nurvita Jerana, Widyawati, Dwi Erviana Passimai, Mardianti M, Fitri Adriyanti, Fauziah Rezekiyani, Fajriah Ramadani,**

Yuliyana dan Aswin Nugraha Sailallah terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;

9. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 57 khususnya posko desa Watutoa **Muchsin Dari, Alpiandi, Suparman, Hannah Shidiq, Fatmawati, Mutmainnah, dan Harjumpyati Fadhillah**, dan special untuk ibu posko bapak **Andi Darwis** dan ibu **Andi Ati**. Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini;
10. Kepada teman-teman Seperjuangan SMA Negeri 7 Bulukumba Angkatan 2014 yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 30 Maret 2018

Penulis

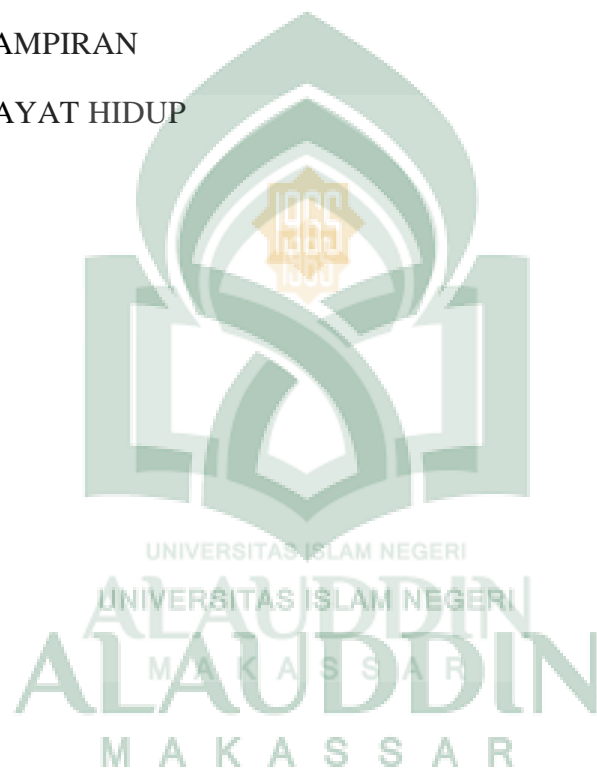
EMA FEBRIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13-34
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Harta Bersama.....	13
2. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	14
B. Hak Keperdataan Istri Dalam Perkawinan	17
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	17
C. Hak-Hak Wanita Pasca Perceraian.....	20
1. Pengertian Mut'ah	20
2. Pengertian Iddah.....	22

3. Pengertian Hak Hadhanah	25
D. Hak Milik Dan Masalah Harta Bersama	27
E. Gonogini Dalam Perkawinan Dan Penyelesaiannya	27
F. Dasar Hukum Harta Bersama	31
G. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35-40
A. Field Research Kualitatif Deskriptif	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
1. Pendekatan Yuridis.....	36
2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)	36
C. Sumber data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI DALAM HARTA BERSAMA PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB	41-68
A. Gambaran Umum Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB	41
B. Pengaturan Hak-Hak Keperdataan Yang Dimiliki Istri Dalam Suatu Ikatan Perkawinan Pasca Cerai Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	56

C. Implementasi Perlindungan Hak Keperdataan Istri Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB	68
BAB V PENUTUP	102-104
A. Kesimpulan	102
B. Implikasi Penelitian.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105-107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
ا_u...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Ema Febrianti

NIM : 10100114239

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B? Selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana pengaturan hak-hak keperdataan yang dimiliki istri dalam suatu ikatan perkawinan pasca cerai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2). Bagaimana implementasi perlindungan hak keperdataan istri pasca cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research Kualitatif* yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap mengenai perlindungan hak keperdataan istri dalam harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induksi mengenai praktik pengaturan hak-hak keperdataan istri serta implementasi perlindungan hak keperdataan istri pasca cerai terhadap praktik harta bersama dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dalam sengketa harta bersama pada putusan Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm. secara garis besar telah sesuai dengan aturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Implikasi Penelitian ini yaitu: 1.) Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa harta bersama, para pihak yang merasa keberatan terhadap pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama 30:70 dapat mengajukan upaya hukum. Karena dalam pertimbangan hakim selain menegakkan hukum juga menegakkan keadilan. 2.) Pihak yang bersengketa harus lebih memprioritaskan kekeluargaan apalagi jika para kedua belah pihak yang bersengketa memiliki keturunan, selain itu harus selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan dan saling menghargai hak-hak orang lain.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik atau nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan².

Sebagaimana yang di ketahui bahwa perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat sakral. Maka dari itu banyak hal yang harus di lalui saat akan menjalani perkawinan, mulai dari acara khitbah (peminangan) dan di lanjutkan dengan prosesi akad nikah hingga prosesi walimah (berkumpul) dilakukan yang bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwasanya pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Dan harta benda yang di peroleh oleh suami istri selama berlangsungnya suatu perkawinan tersebut menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan apabila harta yang di peroleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga, maka tetap menjadi harta bersama.

Karena itu, harta yang di peroleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Jadi, keduanya berhak untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), h.7.

berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³ Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ayat yang secara tegas menyebutkan harta bersama, akan tetapi QS al-Nisa/4:32. Menjelaskan adanya perkongsian antara suami istri:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾⁴

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Asbabun Nuzul Ayat 32:

Dari Muhajid bahwa Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, laki-laki berperang sedang kami wanita tidak berperang dan kami mendapat separuh warihan. Maka Allah menurunkan ayat ini.”⁵

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VIII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

³ Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 83.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 83.

⁵ *Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 84.

- (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang di dapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Apabila kekayaan tersebut di gunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak di perbolehkan. “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di prbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Ps. 92 KHI). Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggungjawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali.⁶

Masyarakat islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam hal seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah perbelanjaan juga sudah tidak lagi di

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.161.

persoalkan. Sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat, jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama. Setelah itu baru mengenai wasiat, utang, dan ongkos pemakamannya. Demikian pula jika terjadi perceraian, maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan seperti tadi sudah menjadi lebih kuat, karena telah di tuangkan ke dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Dalam Islam, meskipun pembahasan mengenai harta bersama tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur'an, hal itu bukan berarti praktek harta bersama dilarang. Praktek harta bersama boleh dilaksanakan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan harta bersama di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak di benarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya ke dalam bentuk apapun. Sesuai dalam pasal 36 ayat (1), bilamana ketentuan tersebut di abaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat di

⁷Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h.59.

katakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, yang artinya perbuatan hukum dimaksud dapat di batalkan atau batal demi hukum.

Oleh karena itu, terhadap masalah persetujuan yang dapat mengakibatkan batalnya perbuatan hukum suami atau istri terhadap harta bersama, sedikit banyaknya telah mematikan hak-hak kenikmatan suami atau istri terhadap harta yang di perolehnya. Dan bila dikaitkan dengan ketentuan hak milik sebagaimana di atur dalam pasal 570 KUHPerdara, sudah jelas ketentuan klausul dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang harta bersama dan harta bawaan sangat bertentangan, karena pasal 570 KUHPerdara menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Namun demikian, dalam hal terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Perkawinan, maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas perjanjian perkawinan. Dan sama halnya menurut pasal 97 ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau

duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸

Perkara mengenai harta bersama bagi suami-istri yang sama-sama beragama islam telah banyak diterima Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B. Sehingga peran hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan sengketa harta bersama haruslah mengacu pada rasa keadilan masyarakat tatkala mereka mempercayakan penyelesaian pada lembaga peradilan. Problem sosial sering di jumpai bahwa bila salah satu pihak suami atau istri berprofesi untuk mencari nafkah keluarga sedangkan salah satu pihak tidak menghasilkan pendapatan. Maka, ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B dengan membagi harta bersama masing-masing suami-istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dianggap kurang tepat bagi pencari keadilan.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Untuk kali ini, akan dibahas tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta perkawinan, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan

⁸Sabri Samin. *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.126.

penelitian mengenai Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

- a. Memfokuskan penelitian pada pengaturan hak-hak keperdataan yang dimiliki istri dalam suatu ikatan perkawinan pasca cerai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisa implementasi perlindungan hak keperdataan istri pasca cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

2. Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dari pembaca terhadap variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul serta memudahkan pemahaman terhadap judul tersebut, maka penulis akan mengemukakan deskripsi fokus sesuai pembahasan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar seorang berdasarkan logika.
- b. Harta Bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.⁹
- c. Pasca Cerai adalah setelah putus hubungan sebagai suami istri.¹⁰
- d. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul yang diatas adalah pembahasan mengenai perlindungan hak keperdataan seorang istri dalam harta bersama pasca cerai dengan jalan mengetahui pengaturan hak-hak keperdataan yang dimiliki istri dalam suatu ikatan perkawinan pasca cerai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian menganalisis implementasi perlindungan hak keperdataan istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hak keperdataan seorang istri

⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 56.

¹⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.web.id/pascacerai.html> (16 Desember 2017).

¹¹ Pengertian Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama.

dalam harta bersama pasca cerai?” untuk mengkaji masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hak-hak keperdataan yang dimiliki istri dalam suatu ikatan perkawinan pasca cerai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak keperdataan istri pasca cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B?

D. Kajian Pustaka

Mengenai pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dan jumlah teori yang ada berdasarkan literatur yang ilmiah. Adapun yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi adalah, penulis menelaah lewat bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, dan berbagai macam tulisan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, di tulis oleh Said Agil Husein Al Munawar, yang membahas tentang analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah, menganalisis perkara dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tentang hukum keluarga islam yang berlaku di Indonesia dan dari segi pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.

hukum yang pernah di putuskan oleh Pengadilan Agama yang meliputi masalah-masalah seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah

status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah –masalah yang baru yang sering kali belum ada rujukanya secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh. .¹²

“Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, karangan Ahmad Rofiq, membahas tentang Hukum perdata islam di Indonesia yang mengatur tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain.¹³

“Fikih II”, karangan Sabri Samin, dkk. Membahas tentang masalah perdata yang menjadi kewenangan pengadilan Agama salah satunya masalah kedudukan harta dalam perkawinan. Menurut pasal 36 (1) Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak di benarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikanya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkanya dan kedua belah

¹²Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h.2.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.7.

pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainya dalam hal ini si suami atau si istri.¹⁴

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya tulis ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak di capai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak keperdataan yang dimiliki istri dalam suatu ikatan perkawinan pasca cerai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi perlindungan hak keperdataan istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat luas, adapun harapan penulis sebagai berikut :

- a. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan

¹⁴Sabri Samin, Fikih II, h.130.

yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah pembagian harta bersama.

- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan hukum acara peradilan agama pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.¹⁵

Penggunaan harta bersama suami isteri atau harta dalam perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaanya, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Jadi, harta kekayaan dalam perkawinan yang biasa disebut dengan *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendirian maupun bersama antara suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan, selanjutnya disebut harta bersama. Harta bersama ini biasa disebut dengan gonogini. Hal ini tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁶

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 56.

¹⁶ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 125.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI). Beliau telah menformulasikan harta benda yang diperoleh suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama. Terhadap ketentuan ini ada pengecualian, yakni jika uang pembeli barang tersebut berasal dari hasil penjualan barang bawaan masing-masing, atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli tersebut. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi kontan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974, Tanggal 16 Desember 1975.
- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya selama masa perkawinan suami istri itu mempunyai uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari hasil usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka.

Dari uang tersebut kemudian suami membangun sebuah rumah dan membeli satu unit mobil.

Kedudukan rumah dan satu unit mobil itu, menurut yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 803 K/Sip/19770, tanggal 5 Mei 1970, termasuk kedalam objek harta bersama suami istri tersebut. Hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.

c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak di permasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka hukum menganggap bahwa harta itu merupakan harta bersama suami istri tersebut. Hal ini telah didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 806 K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.

d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan, dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami istri dari orangtuanya atau dari selainnya.

Begitu pula harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan, adalah harta bawaan. Penghasilan yang diperoleh dari harta bawaan itu dihitung sebagai harta bersama. Misalnya si istri mendapat warisan dari orang tuanya berupa satu unit ruko, setelah perkawinan terjadi ruko itu disewakan, hasil sewanya dihitung sebagai harta bersama.

- e. Segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan. Suami yang berprofesi sebagai pedagang dan istri bekerja sebagai pegawai negeri/PNS, penghasilan masing-masing mereka jatuh menjadi harta bersama. Bagaimana jika misalnya hanya suami saja yang bekerja dan mendapat penghasilan, sementara si istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tugas sehari-harinya hanya mengurus anak dan tidak mempunyai penghasilan. Dapatkah penghasilan suami itu dianggap sebagai harta bersama? Jawabnya adalah *dapat*, sebab segala penghasilan yang diperoleh selama dalam perkawinan, dihitung sebagai harta bersama. Tidak dipermasalahkan siapa yang mencari, atas hasil usaha siapa. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka ia jatuh menjadi harta bersama.¹⁷

Bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁸ Benda berwujud meliputi:

¹⁷ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.134-137.

¹⁸ Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”

- a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
- b. Benda bergerak, seperti mobil.
- c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll.

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa:

- a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi utang-utang.¹⁹

B. Hak Keperdataan Istri Dalam Perkawinan

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Karena antara suami dan istri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dalam ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya, diantara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan istri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.

a. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Diantara hak, kewajiban dan kedudukan dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.247.

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya.
2. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
4. Suami (bersama-sama) dengan istri berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai istri.
6. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sedangkan diantara hak, kewajiban dan kedudukan dari istri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Istri mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
2. Istri juga cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam

sistem HUKPerdata (yang berasal dari Belanda), sedangkan istri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.

3. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
4. Istri (bersama-sama dengan suami) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.²⁰

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

²⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 19-20.

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²¹

C. Hak-Hak Wanita Pasca Perceraian

1. Pengertian Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian wajib dari mantan suami kepada mantan istrinya ketika terjadi perceraian adalah dua hal sebagai berikut:

²¹Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.23.

1. Jika perceraian atas prakarsa suami (cerai talak), artinya pihak suami yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
2. Bagi isteri yang “ba’da al dukhul” belum ditetapkan maharnya.

Adapun mut’ah sunat adalah pemberian suami pasca perceraian tanpa syarat, artinya tanpa menggantungkan pada syarat, misalnya terjadi perceraian bagi isteri yang ba’da al dukhul (telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri), namun belum ditetapkan maharnya karena mut’ah adalah suatu pemberian yang dimaksudkan menyenangkan dan menggemberikan hati mantan isteri pasca perceraian. Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غُوْهُنَّ وَسِرْجُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً²²

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian suami dalam bentuk mut’ah pasca perceraian merupakan penggembira yang dapat menyenangkan hati isteri sehingga perceraian diharapkan tidak menjadi prahara rumah tangga (keluarga) yang

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 424.

berdampak pada putusnya hubungan silaturahmi antara suami isteri maupun antara rumpun keluarga suami isteri.

Ibnu Abbas dan Al-Hasan menyatakan bahwa bentuk mut'ah adalah memberikan pembantu atau memberi nafkah dan yang terendah pakaian, atas orang kaya, Ibnu Umar menetapkan mut'ah minimal 30 (tiga puluh) dirham. Hal ini dilakukan pula oleh Hasan bin Ali.

Proses pengajuan tuntutan (gugatan) mut'ah wajib adalah:

1. Gugatan rekonsensi. Apabila suami yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka seorang isteri dapat mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) berupa penghukuman atau pembebanan bagi pihak suami untuk memberikan mut'ah wajib kepada isterinya yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dalam sidang. Pengajuan gugatan rekonsensi secara umum, yang dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.
2. Dapat diajukan secara tersendiri pasca perceraian (cerai talak). Apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (cerai talak), dan pembayaran mut'ah tidak dituntut pada saat berlangsung proses persidangan, maka gugatan mut'ah dapat diajukan secara tersendiri.

2. Pengertian Iddah

Iddah dari kata “*adad*” artinya menghitung, maksudnya perempuan (bekas isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (bekas isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Macam-macam *Iddah*:

- 1) *Iddah* dengan kematian suami
 - a. Waktu *Iddah* bagi seorang janda karena kematian suaminya dan tidak hamil adalah berlaku waktu tunggu 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
 - b. Waktu tunggu bagi janda yang kematian suaminya dan dalam keadaan hamil, maka masa *Iddahnya* sampai melahirkan.

Firman Allah SWT. Dalam QS al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

- 2) *Iddah* karena pisah hidup

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h .38 .

- a. Masa Iddah bagi wanita yang masih haid karena terjadi pisah hidup adalah 3 (tiga) kali suci.
 - b. Masa Iddah bagi janda yang telah putus masa haidnya atau yang telah tidak haid adalah 3 (tiga) bulan.
- 3) Masa Iddah bagi janda yang hamil, maka masa Iddahnya sampai ia melahirkan anaknya.
- 4) Bagi janda yang qobla al dukhul (seorang isteri tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri setelah berlangsung perkawinanya), maka tidak berlaku baginya masa menunggu (Iddah). Artinya dapat langsung menikah setelah terjadi perceraian. Masa menunggu hanya berlaku bagi isteri yang telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Adapun uraian mengenai nafkah iddah, yaitu:

Secara umum, bagi isteri yang terpisah hidup dari suaminya, ada hak untuk mendapatkan nafkah iddah selama masa *iddah*. Menurut Mazhab Malikiah bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*, sedangkan wanita yang ditalak bain tidak mempunyai hak nafkah, kecuali hak tempat tinggal selama masa *iddah*. Namun demikian, wanita hamil ditalak bain mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i bagi wanita yang ditalak 3 (tiga) kali, tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil.

Talak bain adalah terdiri dari dua macam, yakni *talak bain sughra* dan *talak bain kubra*. *Talak bain sughra* adalah talak yang tidak boleh rujuk kembali, tapi boleh kawin lagi atau akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Firman Allah SWT, dalam QS al-Baqarah/2: 230. Sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²⁴

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Dalam ketentuan fikih, masa iddah tersebut juga masa berkabung hanya peruntukkan bagi wanita, namun dari segi kemanusiaan seorang isteri yang tinggal mati suaminya harus juga menjalani masa berkabung. Masa berkabung (iddah) bagi suami adalah menurut kepatutan masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan bagi wanita sebagai pertanda turut merasakan penderitaan yang dialami oleh anak-anak yang ditinggal mati oleh ibunya dan keluarganya.

3. Pengertian Hak Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “*hidhan*” artinya lambung. Menurut istilah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bagi anak kecil sejak ia lahir sampai mampu

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 36.

menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Menurut As-Shan'ani, hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan dan pemeliharanya dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya. Menurut Jawad Mugniyah hadhanah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak baik menyangkut perkawinan maupun sesuatu menyangkut dengan hartanya.

1. Hak Hadhanah

Meskipun hak hadhanah pasca perceraian adalah hak ibu, namun biaya pemeliharaan (hadhanah) dibebankan atau menjadi tanggungjawab ayah. Apabila seorang ayah melalaikan kewajibannya itu, tanpa alasan yang sah, maka ibu (bekas isteri) dapat menuntut biaya hadhanah ke Pengadilan Agama setempat untuk menghukum bekas suami membayar biaya hadhanah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan selayaknya menurut ukuran lingkungan tempat tinggal pemegang hak hadhanah.

2. Syarat-Syarat Pemegang Hadhanah

- a. Baliq atau dewasa, artinya mampu melakukan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak.
- b. Berakal, artinya orang yang sehat akal pikirannya.
- c. Sehat jasmani (sehat psikis).

- d. Mampu mendidik, orang yang mampu dan mempunyai kemampuan untuk mendidik, memelihara dan tidak terkait dengan pekerjaan yang menyebabkan anak terlantar.
- e. Amanah dan berakhlak
- f. Tidak kawin lagi, jika ibu kandung diberi hak hadhanah di syaratkan tidak kawin lagi sampai anaknya *mumayyis* karena perhatiannya tidak lagi terfokus pada anak yang diasuhnya.
- g. Seagama, pendidikan agama sangat penting ditanamkan pada anak-anak sejak dini.

Ada dua alasan untuk dapat mencabut hak hadhanah bagi pemegang hak hadhanah sebagai berikut:

1. Orang yang diberi hak hadhanah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang dibawa pemeliharanya.
2. Berkelakuan buruk sekali. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan orangtua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya. Boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu yang lama, sakit, gila dan bepergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya.

D. Hak Milik Dan Masalah Harta Bersama

Masalah harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitab fikih, karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga.

E. Gonogini Dalam Perkawinan Dan Penyelesaiannya

a. Prinsip Dasar Harta Bersama

Adapun yang merupakan prinsip dasar tentang harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan menjadi hak masing-masing pribadi yang membawa harta tersebut kedalam perkawinan.
2. Seluruh hasil dari harta bawaan menjadi hak pribadi dari pemilik harta bawaan tersebut.
3. Seluruh harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan, hibah atau wasiat menjadi hak pribadi dari penerima warisan, hibah atau wasiat tersebut.
4. Seluruh harta yang di dapat oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak selama dalam perkawinan (kecuali harta yang diperoleh karena warisan, hibah, atau wasiat) menjadi milik bersama suami istri (gono gini).
5. Para pihak dapat menentukan sendiri status hartanya dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

b. Penyelesaian Harta Perkawinan (gonogini):

1. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama
2. Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa:
 - a. penentuan harta bersama suami istri;
 - b. pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri;
 - c. penentuan bagian masing-masing suami istri, dan
 - d. pembagian harta bersama suami istri.
3. Sengketa harta perkawinan dapat timbul karena:
 - a. putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian, atau
 - b. tanpa putusnya perkawinan.
4. Penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan:
 - a. bersama-sama dengan perkara perceraian,
 - b. setelah terjadinya perceraian, atau
 - c. setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami istri atau kedua suami istri.

5. Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam konvensi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonvensi dari tergugat/ termohon.
6. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterima sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri.
7. Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan.
8. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
9. Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian.

10. Demikian pula pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan pembagian harta waris.
11. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka:
 - a. Sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami/istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi
 - b. Apabila hal ini menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Umum.
12. Dalam sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan.
13. Apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan (penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi.²⁵

F. Dasar Hukum Harta Bersama

Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam QS an-Nisaa/4: 21. Sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

²⁵ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 143.

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa bagaimana kamu akan mengambilnya kembali artinya dengan alasan apa padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain atau telah berhubungan sebagai suami isteri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian atau pengakuan yang erat atau berat, yakni berupa perintah ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.²⁷

Selanjutnya, disebutkan dalam QS an-Nisaa/4: 32. Sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya, baik dari segi keduniaan maupun pada soal keagamaan agar hal itu tidak menimbulkan saling

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 81.

²⁷ JavanLabs, Tafsir Quraish Shihab, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-21> (10 Maret 2012, 22:56)

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83.

membenci dan mendengki. (Bagi laki-laki ada bagian) atau pahala dari apa yang mereka usahakan disebabkan karena perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain. (Dan wanita ada bagian pula dari apa yang mereka usahakan) misalnya mematuhi suami dan memelihara kehormatan mereka.²⁹

Dan demikian juga disebutkan dalam QS an-Nisaa/4:34. Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكْبِيرًا ۝³⁰

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang isteri tidak boleh berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Selain itu, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Allah kemudian menjelaskan cara seorang suami dalam menghadapi isterinya yang dikhawatirkan melanggar atau tidak

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84

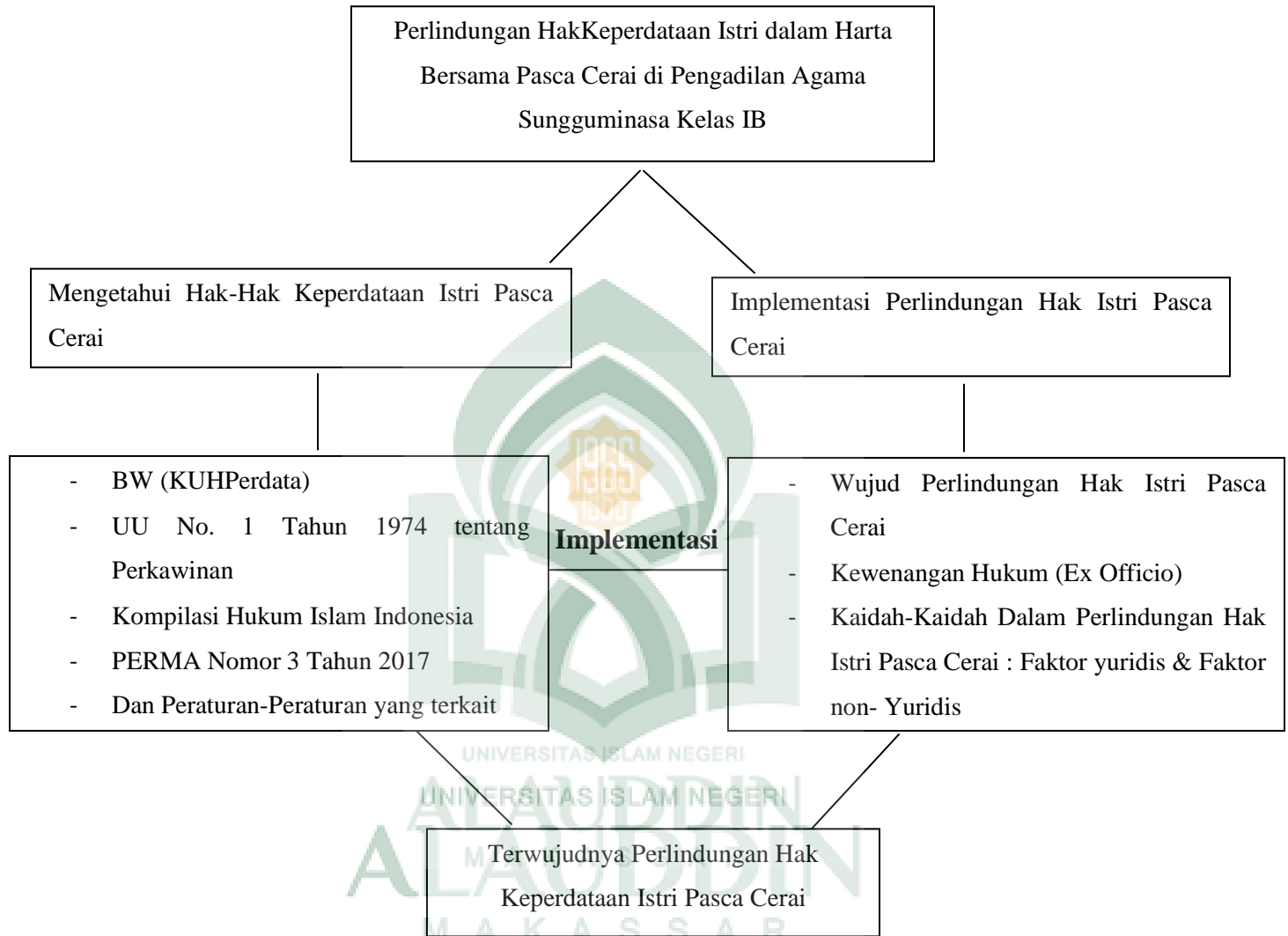
³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

taat yang disebut dengan Nusyus. Maksudnya, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.³²



³²*Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34.* [http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34](http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir_Al-Quran,_Surat_An-Nisaa_Ayat_34) (13 Agustus 2012, 10:11).

G. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.Field Research Kualitatif Deskriptif

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Arahnya penelitian hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan arah penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan (*field research*). Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

Karakteristik dari jenis penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif terhadap seluruh asas-asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materiil maupun hukum formil serta KHI dan bagaimana ketentuan tersebut di posisikan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kabupaten Gowa, dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Pilihan lokasi tersebut

didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan oleh penulis.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikanya dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan yang ditempuh penulis dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, Qiyas, atau pendapat para ulama.

C. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku literature yang berhubungan dengan objek penelitian, informasi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan bahan kepustakaan seperti, Koran, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh didapatkan melalui dokumentasi, pengumpulan bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literature lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai peraturan seperti peraturan perundang-undangan, mengumpulkan data dan menilai untuk membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun melalui pengamatan (observasi) dan menggunakan data-data/ dokumen.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.³³ Adapun beberapa jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang digunakan sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai untuk memperoleh informasi dari informan dalam mengumpulkan data.
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengelolah

³³Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

data adalah sebagai berikut: pertama, adalah identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah disiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, verifikasi data yakni meneliti keabsahan data.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

a. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

b. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya surat bukti wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan surat bukti wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI DALAM HARTA

BERSAMA PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA

SUNGGUMINASA KELAS IB

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang kepala pemerintah “Somba” atau “Raja”. Daerah tingkat II (TK II) Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya Pemerintah Gowa menjadi daerah TK II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembukaan Daerah TK. II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembukaan Daerah TK. II di Sulawesi (Tambahan lembaran RI Nomor. 1882). Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama Andi Ijo Dg. Muttawang Karaeng Lalowang, yang juga dikenal dengan nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXIV).³⁴

Somba sebagai kepala Pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat dibidang Agama Islam yang disebut “Kadi” (Qadli). Meskipun demikian, tidak

³⁴ Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

semua somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika Agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh Rakyat Kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli yang pertama diangkat oleh Raja Gowa bernama Muhammad Iskin. Qadli pada saat itu berfungsi sebagai penasihat kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang Agama, demikian secara turun temurun sampai pada Qadli keempat sekitar tahun 1857-1956.³⁵

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1959 terbentuklah kepala jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956 diangkat oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai kantor urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus Qadli) yang tugasnya hanya sebagai pendoa dan Imam pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada tanggal 3 Desember tahun 1966, terbit surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966 yang mengamanatkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sungguminasa dan menjalankan tugas-tugas Peradilan sebagaimana PP Nomor 45 tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 1967 dan dipimpin oleh ketua Agama Mahkamah/Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha serta memiliki wilayah kekuasaan meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.³⁶

³⁵ Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

³⁶ Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Awal berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa, hanya memiliki 2 (dua) orang pegawai, yaitu K.H.M Shaleh Thata sebagai ketua dan Muh. Syahid sebagai pesuruh. Praktis dengan kondisi demikian, Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat berbuat apa-apa, siding-sidang belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah lembaga Peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. Padahal, sebuah persidangan hanya dapat dilaksanakan bila unsur-unsur tersebut ada. Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga Peradilan, tetapi dari segi sarana fisik (perkantoran) dan alat-alat administrasi serta pendukung lainnya sangat minim, sehingga terkadang digunakan uang pribadi ketua.

Sebagai tempat segala pelaksanaan segala aktifitas Peradilan, Pengadilan Agama Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang berhadapan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Di rumah sakit itulah, Pengadilan Agama Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan. Kurung waktu 1967-1976, Pengadilan Agama Sungguminasa masih dalam tahap pembenahan mendasar. Dengan demikian, tugas-tugas sebagai sebuah lembaga Peradilan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dimaklumi, disebabkan minimnya personil (tenaga kerja) maupun sarana pendukung lainnya (administrasi dan perkantoran).³⁷

³⁷ Lihat Skripsi Munawir, *Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Studi PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo) Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 48.

Begitu pula dengan para pencari keadilan yang berperkara, menyampaikan permohonan ataupun gugatannya tidak tertulis, tetapi secara verbal (lisan). Tetapi sebelum masalahnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing melalui tokoh masyarakat, tidak dapat menyelesaikannya, lalu kemudian diproses oleh Pengadilan Agama untuk proses lebih lanjut.³⁸

Pengadilan Agama Sungguminasa berkantor di jalan Mesjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini Pengadilan Agama telah telah dipimpin oleh:

- a) K.H. Muh. Saleh Thata (1966-1976)
- b) K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir (1976-1982)
- c) K.H. Muh. Syahid (1982-1984)
- d) Drs. Andi Syamsu Alam, S.H. (1984-1992)
- e) K.H. Muh. Alwy (Tidak aktif)
- f) Drs. Andi Syaiful Islam Thahir (1992-1995)
- g) Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H. (1995-1998)
- h) Drs. Hj. Rahma Umar (1998-2003)
- i) Drs. Anwar Rahman (4 Februari s/d 14 September 2004)
- j) Drs. Khaeril R, M.H (4 Oktober s/d 14 Desember 2007)
- k) Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H (14 Desember 2007 s/d 2012)

³⁸ Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa : Kelas 1B

- l) Drs. Hasanuddin, M.H (2012 s/d 2014)
- m) Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H (2015 s/d 2017)
- n) Drs. Ahmad Nur., M.H (2017 s/d Sekarang)

Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku diantaranya:

- 1) Suku Bugis
- 2) Suku Makassar
- 3) Suku Mandar
- 4) Suku Toraja dan Jawa serta suku-suku lain. Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, terutama yang tinggal di ibukota.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan dari BPS Kabupaten Gowa tahun 2017 berjumlah 586. 069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh Departemen Agama pemeluk Agama Islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki presentase sebesar 99,15 persen dengan perincian sebagai berikut:

- Islam : 581.855
- Kristen Protestan : 2.435
- Kristen Katolik : 1.356
- Hindu : 154
- Buddha : 269

2. Letak Geografis

Awal pendirian Pengadilan Agama Sungguminasa beralamat di jalan Andi Mallobassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah di jalan Mesjid Raya No. 25 dan menempati gedung baru yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung. Waktu yang ditempuh di Kota Makassar menuju Pengadilan Agama Sungguminasa 15 menit dan 5 menit dari kantor Bupati Gowa dan lapangan Syekh Yusuf. Secara geografis, Pengadilan Agama Sungguminasa letak astronomis 5.11.55.6.Ls-119.27.11.3”BT dan juga memiliki batas-batas wilayah,

- 1) Utara : Kota Makassar;
- 2) Selatan : Kecamatan Palangga dan Kecamatan Bontoranu;
- 3) Barat : Kecamatan Pattalassang;
- 4) Barat : Kecamatan Palangga.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Kelas 1B Yang Agung ”.

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa diatas diharapkan mendapatkan motivasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan aktifitas. Pengadilan Agama Sungguminasa menginginkan dirinya menjadi suatu “lembaga” yang dapat memberikan “jaminan” bagi pencari keadilan, baik dari sisi pelayanan maupun penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kinerja sumber daya manusianya

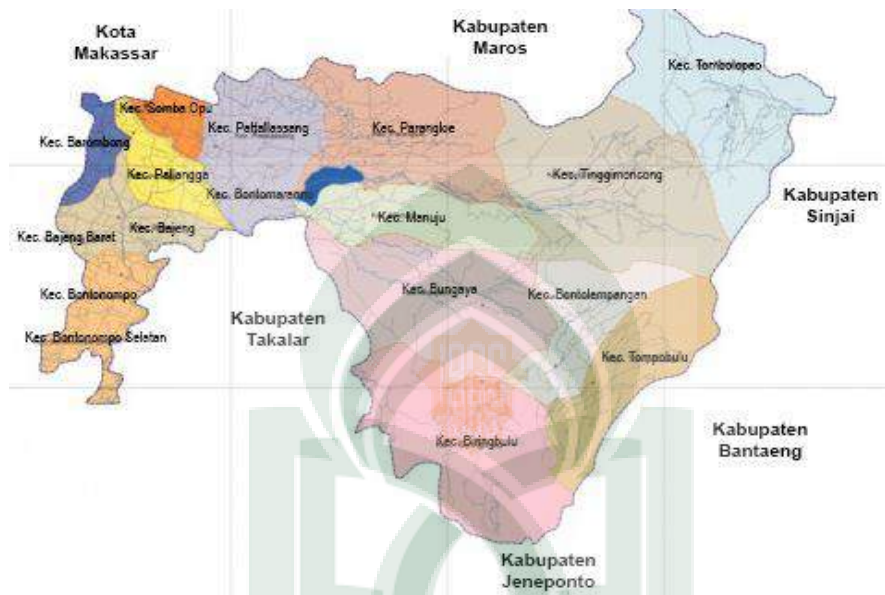
sarana prasarananya maupun sistem yang diterapkan sesuai dengan tugas yang diambil dari Mahkamah Agung itu sendiri, sehingga keberadaannya selalu di perhitungkan, disenangi bahkan dapat menjadi solusi bagi semua pihak. Keinginan yang menjadi institusi yang berkualitas sehingga dapat disejajarkan bersama dengan institusi lainnya dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik tentunya mempunyai konsekuensi yang cukup berat dan cukup menantang dari perwujudandari rasa keinginan tersebut. Keinginan besar ini akan diiringi dengan Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya lembaga Pengadilan Agama.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah ditetapkan tersebut setelah dikutip dalam laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa, maka beberapa visi Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai perwujudan dari Misi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun mendatang, diantaranya:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 2) Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4) Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.

3. Wilayah Yurisdiksi

Adapun Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah meliputi 18 Kecamatan, yaitu:

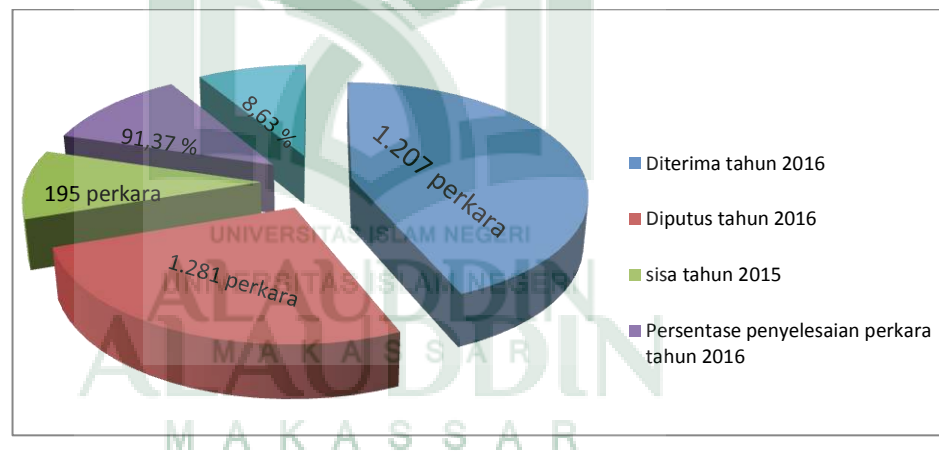


- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Bontompono | 10. Kecamatan Parang Loe |
| 2. Kecamatan Bontompono Selatan | 11. Kecamatan Manuju |
| 3. Kecamatan Bajeng | 12. Kecamatan Tinggi Moncong |
| 4. Kecamatan Bajeng Barat | 13. Kecamatan Tombolo Pao |
| 5. Kecamatan Pallangga | 14. Kecamatan Parigi |
| 6. Kecamatan Barombong | 15. Kecamatan Bungaya |
| 7. Kecamatan Sumbaopu | 16. Kecamatan Bontolempangan |
| 8. Kecamatan Bontomarannu | 17. Kecamatan Tompobulu |
| 9. Kecamatan Pattallassang | 18. Kecamatan Biring Bulu |

4. Jumlah Perkara

1. Keadaan Perkara Diterima (Tahun 2016)

Secara singkat mengenai keadaan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016, dapat dideskripsikan bahwa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara. Jumlah tersebut adalah merupakan akumulasi antara sisa perkara tahun 2015 dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016. Dimana sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 195 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 1.207 perkara. Mengenai kondisi penanganan perkara selama tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:



Jadi persentase penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Perkara Diputus Tahun 2016}}{\text{Sisa Perkara Tahun 2015} + \text{Jumlah Perkara Diterima Tahun 2016}} \times 100 \\
 &= \frac{1.281}{195 + 1.207} \times 100 \\
 &= \frac{1.281}{1.402} \times 100
 \end{aligned}$$

= 91,37 %

2. Perkara Diterima Menurut Jenisnya

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1.	Cerai Talak	212
2.	Cerai Gugat	690
3.	Harta Bersama	5
4.	Kewarisan	6
5.	Wali Adhal	6
6.	Itsbat Nikah	180
7.	Penetapan Ahli Waris	32
8.	Perwalian	20
9.	Dispensasi Nikah	46
10.	Izin poligami	1
11.	Pembatalan perkawinan	1
12.	Penguasaan anak / Hadhanah	3
13.	Lain-lain	5
Jumlah		1.207

3. Keadaan Perkara Yang Diselesaikan

Dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016, termasuk sisa perkara tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah 1.402 perkara. Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan perkara tersebut sampai akhir tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara dan/atau 91,37 %. Sedangkan sisa perkara sebanyak 121 perkara dan/atau 8,63%.

4. Perkara Diputus Menurut Jenisnya

Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016 sebanyak 1.281 perkara yang menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1.	Cerai Gugat	735
2.	Cerai Talak	237
3.	Kewarisan	8
4.	Perwalian	19
5.	Isbat Nikah	184
6.	Penetapan Ahli Waris	34
7.	Dispensasi Kawin	47
8	Harta bersama	2
9	Izin poligami	1
10	Pembatalan perkawinan	1
11	Penguasaan anak/Hadhanah	3
12	Wali Adhal	4
13	Lain-lain	6
Jumlah		1.281

1. Penyelesaian Perkara (Tahun 2017)

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2017 secara umum dapat digambarkan seperti pada matrik berikut:

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket.
1	Sisa Perkara Tahun 2016	105	105	0	
2.	Cerai Gugat	765	683	82	
3.	Cerai Talak	194	155	39	
4.	Kewarisan	6	3	3	
5.	Perwalian	13	13	0	
6.	Isbat Nikah	196	195	1	

7.	Penetapan Ahli Waris	33	33	0	
8.	Dispensasi Kawin	134	134	0	
9.	Harta bersama	14	7	7	
10.	Izin poligami	2	2	0	
11.	Wali Adhal	1	1	0	
12.	Lain-lain	2	2	0	
JUMLAH		1.465	1.333	132	

2. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Pada tahun 2016, terdapat sisa perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 105 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, seluruhnya telah diputus pada tahun 2017.

3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2017, terdapat 1.333 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1.250 perkara. Dengan demikian terdapat 83 perkara yang diputus melebihi dari waktu yang telah ditentukan, yaitu melebihi dari 5 (lima) bulan.

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.³⁹

5. Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	N A M A/ N I P	GOLONG AN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dra. Ahmad Nur, M.H.,M.H.	IV/b	Ketua

³⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016.

	19700803 199703 1 002		
2.	Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M. 19750202 200112 2 004	IV/a	Hakim
3.	Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI 19780504 200212 2 003	III/d	Hakim
4.	Ahamd Jamil, S.Ag 19741012 200502 1 002	III/c	Hakim
5.	Uten Tahir, S.HI.,M.H. 19830309 200704 1 001	III/c	Hakim
6.	Dr. Muhammad Najmi Fajri, S,HI.,M.HI. 19820713 200704 1 001	III/c	Hakim
7.	Hasbi, S.H. 19651208 199303 1 007	III/d	Panitera
8.	Drs. Muhammad Amin, MA 19690716 200303 1 003	III/d	Sekretaris
9.	Tadjudin Maslan, S.H. 19561113 198903 1 001	III/d	Wakil Panitera
10.	Agus Salim Razak, S.H. 19720529 200112 1 003	III/d	Panmud Hukum
11.	Dra. Nadirah 19611130 199003 2 001	III/d	Panmud Gugatan
12.	Haerul Ahmad, S.H.,M.H. 19641201 198801 1 001	IV/a	Panmud Permohonan
13.	Verry Setya Widyatama, S.Kom 19850801 201101 1 010	III/b	Kasubag Perencanaan,I T dan Pelaporan
14.	Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H. 19800129 200701 2 002	III/c	Kasubag Umum dan keuangan
15.	Erni, S.H. 19731231 199402 2 004	III/d	Kasubag Kepeg. dan Ortala
16.	Nur Intang, S.Ag 19710305 199803 2 002	III/d	Panitera Pengganti
17.	Nurwafiah Razak, S.Ag 19731203 199802 2 001	III/d	Panitera Pengganti
18.	Mukarramah Saleh, S.H. 19680604 199003 2 005	III/d	Panitera Pengganti
19.	Dra. Musafirah, M.H. 19680202 199703 2 002	IV/a	Panitera Pengganti

20.	Dra. Jasrawati 19660210 199402 2 001	III/d	Panitera Pengganti
21.	Ibrahim, S.H. 19650714 200302 1 001	III/d	Panitera Pengganti
22.	Darmawati, S.Ag 19611231 199203 2 042	III/d	Panitera Pengganti
23.	Hasbiyah, S.H, 19601231 199402 2 004	III/d	Panitera Pengganti
24.	Drs. S. Ahmad Abbas 19601231 199403 1 024	III/d	Panitera Pengganti
25.	Rahmatiah, S.H. 19610409 199203 2 002	III/d	Panitera Pengganti
26.	Drs. Misi, S.Ag 19600111 199203 1 001	III/d	Panitera Pengganti
27.	St. Suhrah, BA 19581231 198303 2 030	III/c	Panitera Pengganti
28.	Muhammad Rustan, S.H. 19590129 199403 1 001	III/d	Panitera Pengganti
29.	Drs. M. Noor AR 19561231 198402 1 003	III/d	Panitera Pengganti
30.	Dra. I. Damri 19641231 199402 2 003	III/d	Panitera Pengganti
31.	Andi Tenri, S.Ag 19711224 200212 2 001	III/c	Panitera Pengganti
32.	Muh. Aleks, S.H. 19631012 199203 1 005	III/d	Jurusita
33.	Haeruddin, S.H. 19651128 199402 1 001	III/d	Jurusita
34.	Sirajuddin 19670405 199403 1 003	III/a	Jurusita Pengganti
35.	Purnama Santi 19821001 200604 2 004	II/c	Jurusita Pengganti
36.	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom 19790519 200904 2 006	III/c	Staf Kepegawaian
37.	Irwan Syarif, S.Ag.,S.H.,M.H. 19760612 200312 1 002	III/d	Staf Kepaniteraan

B. Pengaturan Hak-Hak Keperdataan Yang Dimiliki Istri Dalam Suatu Ikatan Perkawinan Pasca Cerai Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama islam, berada pada Peradilan Umum, alasanya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam lembaga hukum adat.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang di permasalahan, hal ini di sebabkan karena pasal 35 dan 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama.⁴⁰

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam lapangan hukum perdata pada bagian perjanjian kawin. Disini di tetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula. Istri dapat mengajukan pemisahan harta kekayaan ke pengadilan jika suami mengorbankan kekayaan dan sejenisnya. Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab

⁴⁰ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.143.

fikih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, di dukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka KHI mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Karena prinsip utama hukum keluarga islam adalah bagaimana membangun keluarga inti.⁴¹

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.⁴²

Acara Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu:

1. Dalam suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta kekayaan, yaitu:
 - a. Harta pribadi suami;
 - b. Harta pribadi istri, dan
 - c. Harta bersama suami istri.
2. Harta pribadi suami ialah:
 - a. Harta bawaan suami, yaitu yang di bawanya sejak sebelum perkawinan, dan
 - b. Harta yang di perolehnya sebagai hadiah atau warisan.

⁴¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.215.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 117.

3. Harta pribadi istri ialah:

- a. Harta bawaan istri, yaitu yang di bawanya sejak sebelum perkawinan, dan
- b. Harta yang di perolehnya sebagai hadiah atau warisan.

4. Harta pribadi masing-masing suami dan istri tersebut berada di bawah kekuasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UUP, Pasal 87 (1) KHI).

5. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 KHI).

6. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, misalnya untuk memberikan hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya (pasal 87 (2) c KHI).

7. Harta pribadi yang di tukarkan atau dijual untuk membeli atau membangun sesuatu atau untuk membuat sesuatu yang lain tetap menjadi harta pribadi, kecuali yang merupakan hasil (keuntungan) dari harta pribadi tersebut yang dapat menjadi harta bersama.

Harta bersama suami istri, yaitu:

8. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri (pasal 36 (1) UUP)

9. Harta bersama suami istri atau syirkah ialah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (pasal 1 huruf F KHI)

10. Harta bersama suami istri bersumber dari:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan,
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama,
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri (lihat point 1 dan 2 diatas).
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami istri,
- e. Segala penghasilan pribadi suami,
- f. Segala penghasilan pribadi istri, dan
- g. Segala penghasilan harta bersama suami istri.

11. Harta bersama tersebut dapat berupa:

- a. Benda berwujud atau tidak berwujud;
- b. Benda berwujud meliputi:
 - Benda bergerak,
 - Benda tidak bergerak, dan
 - Surat-surat berharga.

c. Benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (pasal 91 KHI)

12. Terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 (1) UUP).

13. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (Pasal 91 KHI).

14. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 KHI).

15. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri (Pasal 98 KHI).

16. Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta yang ada padanya (Pasal 90 KHI).

17. Pembebanan utang atas harta perkawinan diatur sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan atas harta masing-masing;

b. Pertanggung jawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

c. Apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

d. dan apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri.

18. Apabila perkawinan putus, harta bersama dibagi menurut hukum islam (Pasal 37 UUP).
19. Apabila perkawinan putus, baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing bekas suami/istri mendapat separoh dari harta bersama (Pasal 96 dan 97 KHI).
20. Apabila istri nusyus, maka hal tersebut tidak menghilangkan hak isteri terhadap harta bersama.⁴³

Tentang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan istri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
2. Terhadap harta bersama (gono gini) masing-masing istri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
3. Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing, yang umumnya dibagi 2 (dua) sama besar.

Harta bersama dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 85, 86, 87 KHI.

Pasal 85 KHI

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 245-250.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 KHI

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan atau lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam pasal 36 (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 89 KHI

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 KHI

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta benda yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 96 dan 97 KHI.

Pasal 96 KHI.

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁴

Pasal-pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) atau setengah dari harta bersama. Tidak di perhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi 2 (dua) antara suami dan istri.⁴⁵

⁴⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 57.

⁴⁵ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.146-147.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

Menurut Drs. Ahmad Nur, M.H. (Ketua)

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sesuai dengan pasal 35 (1). Pembagian harta bersama yaitu jika cerai hidup masing-masing suami isteri mendapat seperdua dari harta bersama dalam ikatan perkawinan yang sah, jika terjadi cerai mati, maka pasangan yang lebih lama hidupnya mendapat seperdua bagian dari harta bersama dan seperdua bagian dari harta bersama itu menjadi harta peninggalan atau harta waris bagi ahli warisnya termasuk janda atau duda yang hidup lebih lama ditinggal mati pasangannya suami atau isteri.⁴⁶

Menurut Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. dalam pembagian harta bersama adalah 1:1 atau 50:50 yang disebut dengan hukum. Artinya masing-masing pihak mendapatkan separuh dari harta bersama, perkara tersebut agak berbeda dengan pertimbangan hakim yang berhubungan dengan keadilan bukan penghukuman. Dalam hal keadilan hakim melihat beberapa hal, pertama terbukti atau tidak itu adalah

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Nur, M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 26 Februari 2018.

*harta bersama, kedua terbukti atau tidak siapa yang mempunyai andil disana.*⁴⁷

Menurut Uten Tahir, S.HI., M.H.

*Masing-masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sesuai dengan hukumnya masing-masing. Akan tetapi, hakim juga memberi pertimbangan yang berhubungan dengan keadilan apakah terbukti atau tidak kedua belah pihak mempunyai andil dalam harta bersama.*⁴⁸

Menurut Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

*Pembagian harta bersama suami istri adalah masing-masing mendapatkan seperdua tanpa melihat atas nama siapa, dan siapa yang bekerja atau berusaha baik suami atau istri tetap dianggap masing-masing mempunyai andil terhadap harta tersebut, kecuali adanya perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.*⁴⁹

Menurut Andi Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Uten Tahir, S.HI., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

*Suami istri masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama selama perkawinan berlangsung.*⁵⁰

Dengan demikian, dalam suatu perkawinan istri menggunakan upaya hukum pemisahan harta bersama, maka istri akan mendapatkan separuh dari harta bersama selama perkawinan.

C. Implementasi Perlindungan Hak Keperdataan Istri Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.

Berkenaan dengan permasalahan hak-hak istri dalam harta bersama, secara jelas telah tertuang baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Berbeda dengan harta bawaan ialah harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya suatu perkawinan. Misalnya salah satu pihak mendapatkan harta warisan setelah berlangsungnya perkawinan maka menjadi harta bawaan. Dilihat dari sumber harta tersebut apakah dari hibah, warisan, wasiat walaupun setelah perkawinan maka harta tersebut tidak bisa dikatakan menjadi harta bersama melainkan harta bawaan. Maka dari itu perlu surat menyurat, dll. yang memang menyatakan bahwa itu adalah harta bawaan. Jadi perlu ada pembuktian bahwa itu adalah harta bawaan.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Andi Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

Harta bersama bentuk gugatannya ada dua yaitu ada rekonvensi dan ada gugatan yang berdiri sendiri atau istri mau bercerai dengan suaminya dan suaminya menyetujui dengan syarat pembagian masalah harta bersama dalam hal ini bisa dikatakan bentuk gugatan tersebut termasuk dalam gugatan rekonvensi, adapun gugatan yang berdiri sendiri yaitu setelah bercerai ada akta cerai, dll. diajukan harta bersama. Nafkah lampau, nafkah anak, iddah dan mut'ah itu bisa rekonvensi dan Ex officio begitupun dengan verzet yang memang dari awal tidak pernah hadir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, menyatakan bahwa ada beberapa implementasi hak perdata istri yang dapat dituangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

1. Hak nafkah iddah
2. Hak mut'ah
3. Hak Harta bersama

Implementasi di Pengadilan Agama Sungguminasa meskipun dalam surat gugatan apakah surat permohonan suami yang mengajukan perceraian terhadap istri ataupun istri sendiri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya meskipun hak mut'ah, hak iddah tidak diminta oleh istri akan tetapi jika itu memungkinkan apalagi tidak terbukti istrinya nusyuz maka hak iddah maupun hak mut'ah tersebut secara Ex officio kewenangan hakim dapat dibebankan kepada suami terhadap istri

meskipun tidak diminta apalagi kalau diminta maka sangat dipertimbangkan oleh hakim.⁵¹ Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33:49. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا⁵²

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian suami dalam bentuk mut'ah pasca perceraian merupakan penggembira yang dapat menyenangkan hati istri sehingga perceraian diharapkan tidak menjadi prahara rumah tangga (keluarga) yang berdampak pada putusnya hubungan silaturahmi antara suami istri maupun antara rumpun keluarga suami istri.⁵³

Kemudian selanjutnya sebagaimana yang dituturkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Bapak Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Hak-hak keperdataan yang di maksud itu misalnya seperti mut'ah, mut'ah itu hak istri walaupun tidak nusyus, tapi nafkah dilihat dulu apakah itu nusyuz atau tidak. Misalnya pertama istri pergi meninggalkan tempat tinggal. Kedua Istri selingkuh

⁵¹ Hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Nur, M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 424.

⁵³ Harijah Damis, *Menguak Hak-hak Wanita*, Cet. II; 2008. h. 51.

menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, itu termasuk dalam nusyuz dan kalau nusyuz istri tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun suami pergi meninggalkan rumah.

Nafkah anak dan nafkah istri berbeda. Harta bersama berbeda dengan nafkah. Jadi mut'ah berbeda dengan nafkah. Mut'ah itu adalah kenang-kenangan bahasanya kalau suami mau menceraikan istrinya, suami memberikan sesuatu kepada istri berupa benda untuk kesenangan, walaupun ada yang bilang bahwa mut'ah itu adalah pemberian dari suami yang wajib. Biasanya tiga bulan kemudian setelah masa iddah, habiskan masa iddah itu artinya sudah ditanggung masa iddahnya, nanti terhitung satu tahun ditanggung oleh suami. Jadi kalau misalnya setelah habis masa iddah si istri menikah, mut'ah itu tidak jalan lagi, misalnya iddah si istri Rp. 600.000/bulan jadi iddahnya tiga bulan ditambah 12 bulan jadi iddah si istri yang ditanggung oleh suami adalah 15 bulan setelah itu suami bebas, akan tetapi mut'ah juga berbeda-beda yang penting benda bukan hanya sekedar uang, bukan nafkah, dll. Jadi ada pandangan seperti itu. Bisa juga mut'ah itu bentuknya uang saja langsung yang diberikan kepada istri dilihat dari kemampuan suami, kepatutan dan rasa keadilan.

Selanjutnya disebutkan dalam QS an-Nisaa/4:34. Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁵⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang isteri tidak boleh berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Selain itu, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Allah kemudian menjelaskan cara seorang suami dalam menghadapi isterinya yang dikhawatirkan melanggar atau tidak taat yang disebut dengan Nusyus. Maksudnya, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

⁵⁶ *Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34*. [http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34](http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir%20Al-Quran,%20Surat%20An-Nisaa%20Ayat%2034) (13 Agustus 2012, 10:11).

Hakim melihat siapa yang salah walaupun apakah di dalam perceraian itu tidak dilihat siapa yang salah tapi intinya ialah apakah suami istri itu masih bisa rukun dan mempertahankan rumah tangganya, misalnya suami berzina kemudian suami yang minta cerai bisa saja terjadi, tapi apakah suami istri masih bisa rukun atau tidak. Mengapa ia melakukan perzinahan karena bisa saja istri tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga mengakibatkan perceraian walaupun suami yang melakukan perzinahan, perselingkuhan apalagi sama-sama melakukan perselingkuhan. Jadi bukan kami melihat siapa yang salah dalam perkara perceraian tapi melihat apakah hubungan itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Jadi karena itu merupakan akad dari kedua belah pihak, kalau ada diantara salah satu pihak yang sudah tidak merasa nyaman maka bisa saja diantara salah satu pihak menceraikan atau minta cerai. Kemudian dalam perceraian juga perlu diingat bahwa ada anjuran agar tidak menggantung istri.

Jadi jika masih ingin hubungan baik maka ceraikanlah dengan baik-baik atau dengan ma'ruf jangan sampai bertahun tahun lamanya cukup tiga bulan, karena jika sampai satu atau dua tahun maka adapula yang dikatakan nafkah lampau kepada istri, tapi yang perlu diingat yang namanya nafkah lampau kepada istri tapi ia harus menggugat balik artinya istri harus meminta tidak bisa dipertimbangkan, beda dengan iddah atau mut'ah ada aturan yang membolehkan kalau memang suami sebagai

pemicu dalam masalah rumah tangga apalagi kalau istri terbukti tidak nusyuz maka bisa secara Ex officio hakim memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Jadi dalam hal ini ada tiga yaitu ada nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah setelah diceraikan. Jadi nafkah iddah dengan nafkah lampau itu dilihat lagi apakah nusyuz atau tidak si istri, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang melakukan kesalahan karena jangan sampai yang jadi pemicu adalah istri sehingga suami berzina karena istri selingkuh, dll. Jadi dilihat dulu kalau nafkah itu nusyuz atau tidak jadi kalau tidak nusyuz apalagi itu pemicu dari kesalahan suami bisa secara Ex officio terutama nafkah iddah setelah terjadi perceraian itu, nafkah lampau harus dituntut tidak secara Ex officio, kemudian mut'ah itu apakah istri nusyuz atau tidak ada hak istri yang mau diceraikan.

Jadi walaupun istri tidak menuntut mut'ah secara Ex officio hakim bisa menetapkan, jadi mut'ah tidak ada kaitanya dengan nusyuz atau tidak seorang istri. Dilihat dari kepatutan, keadilan, kemampuan suami, dll. Maka setelah habis masa iddah istri baru bisa menikah lagi. Mengenai nafkah lampau yang bisa dituntut dan nafkah iddah secara Ex officio hakim bisa tetapkan dan mut'ah secara Ex officio hakim bisa tetapkan apalagi kalau dituntut.

Masalah anak kalau dibawah 12 tahun itu adalah hak utama si istri kecuali jika ada hal-hal yang misalnya akhlaknya kurang baik, dll dilihat dari masalah yang ada. Jadi intinya kalau anak itu pola pikirnya adalah bagaimana menjalin

kemasyarakatan si anak bukan keinginan bapak atau ibunya. Kemudian masalah anak yang belum berumur 12 tahun biasanya ikut ibunya kecuali jika ada hal-hal yang tidak sesuai misalnya perilaku si ibu yang tidak baik atau akhlaknya seperti sering mabuk, merokok, dll bisa saja terbukti. Dan setelah umur anak mencapai 12 tahun ia bisa memilih sendiri mau ikut ibu atau bapaknya dan yang berkewajiban memberi nafkah ialah bapak sedangkan ibu memelihara dengan sebaik-baiknya. Kewajiban si bapak juga dilihat dari kemampuan, kepatutan dan keadilan. Nafkah anak tidak harus dituntut akan tetapi bisa ditetapkan oleh hakim secara Ex officio membebankan kepada si bapak (SEMA No.04 tahun 2016). Intinya jika terbukti anak dipelihara oleh si ibu maka hakim bisa secara Ex officio menetapkan nafkah anak kepada si bapak. Nafkah anak diberikan sesuai dengan kemampuan si bapak yang penting ia memenuhi kewajiban terhadap anak tersebut. Dan apabila anak terbukti itulah yang di Ex officio yaitu iddah, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah lampau itu harus dituntut, kemudian anak nafkah lampau maksudnya yang lewat sebelum ada putusan jadi tidak bisa dituntut karena itu intifaq mengambil manfaat bukan di thambling kalau nafkah istri di thambling artinya itu menjadi hutang. Nafkah anak bisa di Ex officio selama terbukti anak diasuh oleh ibunya.⁵⁷

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara harta bersama dalam kasus ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Juli 2016 yang kemudian terdaftar

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 02 Maret 2018.

sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm.⁵⁸ Antara Andi Darmawati binti Andi Daud memberi kuasa kepada Syaiful Syahrir, S.H., disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** Melawan Teguh Raharjo bin Sunardi memberi kuasa kepada Nuraeni M. Ahmad, S.H., M.H., dan Awaluddin, S.H.,M.H., disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Tentang duduknya perkara, Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam surat gugatan itu di jelaskan bahwa:

Dalam Konvensi

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2001 berdasarkan pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/144/IV/2001, tanggal 27 April 2001. Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara No. 1726/Pdt-G/2015/PA. Makassar dan putus pada tanggal 25 November 2015, dan pada tanggal 31 Desember 2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan akta cerai No. 1716/AC/2015/ PA. Makassar.

Selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf

⁵⁸ Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Harta Bersama No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Teguh Raharjo bin Sunardi (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Teguh Raharjo bin Sunardi) diperoleh sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro
- Sebelah Selatan : Syarifuddin Goang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Syarifuddin Goang
- 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dikuasai oleh Tergugat.

Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, mengingat harta bersama tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan juga harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah mau membagi harta bersama dimaksud, dan malah Tergugat ingin menguasai harta bersama tersebut secara sepihak dan menghilangkan jejak harta bersama tersebut tanpa memberikan hak Penguat dengan cara ingin menjual secara sembunyi-sembunyi dan atau diduga telah mengambil uang kepada pihak ketiga (objek Yusuf Bauty No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Teguh Raharjo bin Sunardi (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa

dikuasai oleh Tergugat Teguh Raharjo bin Sunardi), maka wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat harta bersama tersebut (barang bergerak dan barang tidak bergerak), karena merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama (akan dibuktikan pada sidang pembuktian) dimana kesepakatan tersebut 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya. Bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan surat kesepakatan bersama yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk dijual secara lelang atau meletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa

(Sungguminasa) dengan luas 160 M2 atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Teguh Raharjo bin Sunardi (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Teguh Raharjo bin Sunardi) diperoleh sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro
- Sebelah Selatan : Syarifuddin Goang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Syarifuddin Goang
- 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dikuasai oleh Tergugat. Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan surat kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

7. Menghukum Tergugat apabila tidak memberikan bagian Penggugat, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasil dari penjualan lelang dan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat (60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat).
8. Menyatakan sita jaminan (sita marital) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.

Dan/atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis dengan pokok-pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa terhadap uraian tentang harta bersama seperti tersebut, posita gugatan dan perubahannya, maka Tergugat membantah dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. – Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro
- Sebelah Selatan : Syarifuddin Goang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Syarifuddin Goang

Maka rumah tersebut **BUKANLAH MILIK TERGUGAT**, melainkan rumah tersebut masih tetap milik/kepunyaan Abdul Asis Dg. Kulle selaku pemilik asal rumah tersebut.

- Bahwa tidak pernah ada akta jual beli yang terbit antara Tergugat selaku Pembeli dengan Abdul Asis Dg. Kulle selaku Penjual (akan dibuktikan dalam pembuktian kelak). Tergugat hanya pernah memberikan panjar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada Abdul Asis Dg. Kulle, akan tetapi sampai saat ini rumah tersebut belum pernah dilunasi, dan akhirnya sesuai kesepakatan rumah tersebut tidak jadi dijual kepada Tergugat, dan Tergugat dapat menempati terlebih dahulu rumah tersebut, sampai Abdul Asis Dg. Kulle mengembalikan panjar rumah yang sudah diterima dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Dengan demikian tanah dan bangunan (rumah) seperti tersebut diatas bukan merupakan harta gono gini Tergugat dan Penggugat, melainkan milik orang yakni Abdul Asis Dg. Kulle.
 - Bahwa bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00229/Batangkaluku, adalah atas nama Abdul Asis Dg. Kulle, dan tidak pernah ada catatan peralihan hak kepada Tergugat maupun orang lain.
- b. – Bahwa tentang 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012, maka mobil tersebut saat ini sudah tidak ada lagi dan itu diketahui dengan pasti oleh Penggugat. Ketika dimiliki mobil tersebut, masih dalam masa cicilan (kredit), dan pada saat itu Tergugat dan Penggugat bukanlah pihak pertama yang mencicil barang tersebut melainkan sudah berpindah tangan untuk ke-3 (tiga) kalinya kepada Tergugat. Dan saat ini mobil tersebut sudah dipindahtangankan lagi ke pihak lain, dan akhirnya menjadi bermasalah, oleh karena pihak yang mengambil/mengoper tersebut melarikan diri membawa mobil tersebut dan tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini.
- c. – Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005 dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun 2012.

2. – Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut diatas, permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoeraad*) tidak beralasan untuk dipenuhi, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab selesai dan sebelum masuk ke tahap pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui beralasan atau tidak atas permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sela pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah yang amarnya menolak permohonan sita

jaminan Penggugat, selengkapnya penetapan sela tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya mohon putusan.⁵⁹

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi. Selain dalam mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya:

⁵⁹ Data observasi dalam Berita Acara Sidang Putusan No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Pengadilan Agama Sungguminasa, 02 Maret 2018.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dengan uraian-uraian sebagai berikut:

1. – Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga terdapat beberapa harta bersama yang lain, yang diperoleh dalam perkawinan yang tidak disebutkan atau sengaja dikaburkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena harta-harta tersebut tidak disebutkan dalam gugatan pembagian harta gono-gini *a quo*.
2. – Bahwa harta bersama yang dibeli/diperoleh dalam perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 2.1. – 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas \pm 185 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Rua
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik M Nawir
 - Sebelah Timur : Terdapat Jalanan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2013, memasukkan objek tersebut diatas, sebagai jaminan pada Bank BRI Unit Ratulangi, guna pengajuan kredit kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dimana kredit

tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa pada pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Ratulangi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan identitas palsu dalam proses pengajuan kredit tersebut, dan saat ini Penggugat Rekonvensi telah melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan dugaan Penggelapan Sertifikat/Pemalsuan Identitas, di Kepolisian Resort Kota Makassar, sesuai Surat Tanda Bukti lapor Nomor: STBL/1091/V/2015/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tertanggal 19 Mei 2015.

2.2. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi).

- Bahwa terhadap harta bersama ini Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, juga telah melakukan penjualan atas objek harta bersama tersebut kepada orang lain, pada tanggal 21-01-2014 (sesuai Surat Kuasa Nomor 255) yang dibuat dihadapan Notaris Irene Lidjaja, SH. MKn, dan hasil dari penjualan objek harta bersama ini,

dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, tanpa dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa kemudian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menjual harta bersama dengan melampirkan/keterangan berupa identitas palsu (dengan mengaku telah bercerai dengan suaminya), Penggugat Rekonvensi juga telah melaporkan Tergugat Rekonvensi di kepolisian Resort Gowa sesuai Surat Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/39/I/2017/SPKT tertanggal 12 Januari 2017.

2.3. – Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga pernah diberikan dan/atau menerima uang/dana dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai modal usaha penjualan ayam potong, yang dimaksudkan sebagai usaha jangka panjang untuk masa depan anak-anak.

2.4. – Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios yang dibeli secara angsuran, dan setelah proses perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi membawa dan menguasai mobil tersebut.

2.5. – Bahwa dalam perkawinan juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012, dan motor tersebut sekarang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012, yang juga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa semua harta/barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang tersebut diatas diperoleh selama dalam masih ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu semua harta yang telah disebutkan diatas juga adalah harta bersama (gono gini), sehingga setelah terjadi perceraian masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut.

- Bahwa hal ini bersesuaian dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

- Dan Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

- Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

4. Bahwa dengan demikian adalah adil dan berdasar hukum apabila telah terjadi perceraian harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yakni:
 - 2.1. – 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas \pm 185 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Rua
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik M Nawir
 - Sebelah Timur : Terdapat Jalanan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang

2.2. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi).

2.3. – Uang/dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang digunakan sebagai modal usaha penjualan ayam potong.

2.4. - Harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios.

2.5. - Harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012.

2.6. - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012.

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, dan harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 point 2.1 dalam rekonvensi adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab objek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga sangatlah tidak logis apabila Penggugat Rekonvensi menuntut objek sengketa milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dijadikan harta bersama, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 adalah dalil yang mengatakan objek sengketa pada point 2.1 dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang kredit Rp. 200.000.000,- dan kalau memang Penggugat menuntut uang Rp. 200.000.000,- diperuntukkan untuk membayar rumah di Graha Asri Sungguminasa, setelah rumah di Graha Asri laku terjual dengan harga Rp. 377.000.000. Tergugat mengingkarinya sehingga dengan kejadian tersebut menjadi awal dari retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan kredit Rp. 200.000.000,- sebagai jaminan rumah orang tua Penggugat yang terletak di Teluk Bayur, dimana pada saat uang tersebut cair Penggugat Rekonvensi mengambil seluruh uang tersebut dengan alasan meminjam sementara waktu oleh Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan dan malah mengingkari janjinya.

3. Bahwa apabila menyimak berdasarkan aturan itu adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena orang tua Tergugat Rekonvensi tinggal di Teluk Bayur sebelum Tergugat Rekonvensi lahir. Oleh karena itu sangatlah tidak realistis apabila Penggugat Rekonvensi menuntut harta orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan keberadaan objek tersebut orang tua Tergugat Rekonvensi tinggal diobjek yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi lahir, maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 alinea 2.3 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab uang Rp. 160.000.000. adalah tidak ada, yang mana Tergugat mengambil uang hanya Rp. 60.000.000,- namun uang tersebut adalah pinjaman yang berbunga, yang mana Penggugat Rekonvensi meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi dengan uang berbunga (pada saat masih suami istri) dan uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi sudah lunas dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan 3 kali pembayaran melalui rekening Penggugat Rekonvensi, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi sudah melunasinya bersamaan dengan bunganya, olehnya itu agar kiranya dalil Penggugat Rekonvensi dimaksud ditolak adanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusan yang amar berbunyi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dan/atau apabila Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah dan menambah posita dan petitum dengan memasukkan dua objek sengketa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012 dan 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005 sudah dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai dua objek diatas dinyatakan tidak dapat diterima, maka apapun yang tercantum dalam jawab menjawab dan pembuktian mengenai dua objek diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Yusuf Bauty, No. 128 dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2001 dan telah bercerai berdasarkan putusan tanggal 25 November 2015.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Abdul Asis Kulle bin H. Kulle.
 2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Abdul Asis Kulle bin H. Kulle.
 2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.

Maka kedua harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Abdul Asis Kulle bin H. Kulle dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dipegang oleh Tergugat berdasarkan

saran Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 3 dinyatakan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sebagaimana disinggung oleh Penggugat, hal mana tentang kesepakatan tersebut telah dibahas dalam analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian dan tidak terbukti bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan lain, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama (harta gono gini) sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$) untuk bekas suami (duda cerai hidup) dan setengah ($\frac{1}{2}$)-Nya lagi untuk bekas istri (janda cerai hidup). Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS an-Nisa/32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝⁶⁰

Terjemahnya:

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada Allah sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama tersebut, maka Pengugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah: Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak disebutkan atau sengaja dikaburkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas $\pm 185 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Rua
- Sebelah Selatan : Tanah Milik M Nawir
- Sebelah Timur : Terdapat Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang

2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi).
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, juga pernah diberikan dan/atau menerima uang/dana dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk usaha ayam potong.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios yang dibeli secara angsuran, dan setelah proses perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi membawa dan menguasai mobil tersebut.
5. Bahwa dalam perkawinan juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012, yang juga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$) untuk bekas suami (duda cerai hidup) dan setengah ($\frac{1}{2}$)-Nya lagi untuk bekas istri (janda cerai hidup). Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS an-Nisa/32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝⁶¹

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada Allah sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berada pada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi yakni setengah ($\frac{1}{2}$) dari jumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Abdul asis Kulle bin H. Kulle.
 - 2.2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Tergugat.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2.1 tersebut diatas sesuai bagianya masing-masing.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2.2 diatas kepada Penggugat.
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan uang sejumlah Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).⁶²

Setiap putusan Pengadilan Perkara Perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan.



⁶² Hasil Observasi dalam Harta Bersama Putusan No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Pengadilan Agama Sungguminasa, 02 Maret 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan yang relevan mengenai masalah penelitian. Adapun judul yang diangkat oleh Penulis yaitu Perlindungan Hak Keperdataan Istri dalam Harta Bersama Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- 1) Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sesuai dengan pasal 35 (1). Pembagian harta bersama suami istri adalah masing-masing mendapatkan seperdua tanpa melihat atas nama siapa, dan siapa yang bekerja atau berusaha baik suami atau istri tetap dianggap masing-masing mempunyai andil terhadap harta tersebut, kecuali adanya perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.
- 2) Ada beberapa implementasi hak perdata istri yang dapat dituangkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu hak nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama.

Implementasi di Pengadilan Agama Sungguminasa meskipun dalam surat gugatan apakah surat permohonan suami yang mengajukan perceraian terhadap istri ataupun istri sendiri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya meskipun

hak mut'ah, hak iddah tidak diminta oleh istri akan tetapi jika itu memungkinkan apalagi tidak terbukti istrinya nusyuz maka hak iddah maupun hak mut'ah tersebut secara Ex officio kewenangan hakim dapat dibebankan kepada suami terhadap istri meskipun tidak diminta apalagi kalau diminta maka sangat dipertimbangkan oleh hakim.

3) Berdasarkan Putusan Ketua Majelis Hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Putusan Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 12 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”* dan Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau suami istri selama dalam perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*. Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”*.

B. Implikasi Penelitian

1) Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa harta bersama, para pihak yang merasa keberatan terhadap pertimbangan hakim dalam pembagian

harta bersama 30:70 dapat mengajukan upaya hukum. Karena dalam pertimbangan hakim selain menegakkan hukum juga menegakkan keadilan.

- 2) Pihak yang bersengketa harus lebih memprioritaskan kekeluargaan apalagi jika para kedua belah pihak yang bersengketa memiliki keturunan, selain itu harus selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan dan saling menghargai hak-hak orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al Munawar, Said Agil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Harta Bersama No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm.
- Damis, Harijah. *Menguak Hak-hak Wanita*, Cet. II; 2008.
- Damopolii, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Data observasi dalam Berita Acara Sidang Putusan No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Pengadilan Agama Sungguminasa, 02 Maret 2018.
- Definisi Perdata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI Digital.com, 2014.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung; CV Mandar Maju, 2007.
- JavanLabs, Tafsir Quraish Shihab, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-21> (10 Maret 2012, 22:56).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016.
- Lihat Skripsi Munawir, *Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Studi PERMA RI No.

1 Tahun 2014 Tentang Prodeo) Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, 1999.

Moeljadi, David. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. KBBI Digital.com, Edisi V, 2016.

Pengertian Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Poerwardanaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press01, 20.

Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.web.id/pascacerai.html> (16 Desember 2017).

Suma, Muhammad Amin. *Ahkam: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah Dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)) Syarif Hidayatullah, 2010.

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34. [http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34](http://indonesian.tribe.ir/islam/al-quran/item/49302-Tafsir_Al-Quran,_Surat_An-Nisaa_Ayat_34) (13 Agustus 2012, 10:11).

Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009).

Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.





INSTRUMEN PENELITIAN

- Narasumber : 1. Hakim Ketua : Drs. Ahmad Nur, M.H.
2. Hakim Anggota : Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., MHI.
3. Hakim Anggota : Uten Tahir S. HI, M.H.
4. Hakim Anggota : Andi Maryam Bakri, S. Ag. M Ag.
5. Hakim Anggota : Andi Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB

Tanggal Wawancara : 02-Maret-2018

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana hukum islam melihat status harta bersama (gonogini)?

Jawab: Pembagian dalam harta bersama tergantung dari kesepakatan antara suami istri, kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya itu terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja.

2. Bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian?

Jawab: Pembagian harta bersama suami istri adalah masing-masing mendapatkan seperdua tanpa melihat atas nama siapa, dan siapa yang bekerja atau berusaha baik suami atau istri tetap dianggap masing-masing mempunyai andil terhadap harta tersebut, kecuali adanya perjanjian pranikah yang dibuat sebelum menikah.

3. Apakah wajib pembagian harta bersama dalam perceraian?

Jawab: Bila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu berarti beberapa harta itu telah menjadi milik bekas suami atau istri. Bila tidak diberikan atau diserahkan bagianya, maka itu sama saja menguasai benda/harta orang lain dengan melawan hukum serta dapat di pidanakan bila salah satu pihak menyampaikan ke pihak yang berwajib.

4. Bagaimana pembagian harta bersama menurut KUHPerdara setelah terjadi perceraian?

Jawab: Menurut Pasal 119 KUHPerdara, pembagian harta bersama antara suami istri dibagi berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya.

5. Sejauh mana perlindungan hak perdata istri dalam harta bersama pasca perceraian?

Jawab: Jadi ada tiga hal dalam hal ini yaitu ada nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah setelah diceraikan. Jadi nafkah iddah dengan nafkah lampau itu dilihat lagi apakah nusyuz atau tidak si istri. jadi kalau tidak nusyuz apalagi itu pemicu dari kesalahan suami bisa secara Ex officio terutama nafkah iddah setelah terjadi perceraian itu, nafkah lampau harus dituntut tidak secara Ex officio, kemudian mut'ah itu apakah istri nusyuz atau tidak ada hak istri yang mau diceraikan. Jadi walaupun istri tidak menuntut mut'ah secara Ex officio hakim bisa menetapkan, jadi mut'ah tidak ada kaitanya dengan nusyuz atau

tidak seorang istri. Dilihat dari kepatutan, keadilan, kemampuan suami, dll. Maka setelah habis masa iddah istri baru bisa menikah lagi. Mengenai nafkah lampau yang bisa dituntut dan nafkah iddah secara Ex officio hakim bisa tetapkan dan mut'ah secara Ex officio hakim bisa tetapkan apalagi kalau dituntut.

6. Apakah istri berhak menuntut apabila misalnya suami menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan istri?

Jawab: Jadi, meskipun suami telah menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut istri masih bisa mendapatkan haknya yaitu separuh dari harta bersama dengan mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan, adapun bentuk gugatan tersebut disebut dengan gugatan berdiri sendiri yaitu setelah bercerai ada akta cerai, dll. diajukan harta bersama.

7. Bagaimana jika si istri tidak mendapat haknya setelah perceraian?

Jawab: Istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, adapun hak-hak yang bisa diminta yaitu misalnya harta bersama, nafkah anak, nafkah lampau, mut'ah, iddah, dan hak hadhanah yang diajukan setelah ada akta cerai, dll.

8. Bagaimanakah penyelesaian harta bersama setelah terjadi perceraian?

Jawab: Penyelesaian harta bersama setelah terjadi perceraian yaitu sebagian dikuasai oleh suami dan sebagian pula dikuasai oleh istri, jadi dihimpun dulu mana harta bersama kemudian dari harta bersama ini dibagi masing-masing suami istri mendapatkan seperdua.

9. Apakah gonogini bisa disatukan dengan gugatan cerai?

Jawab: Harta bersama bentuk gugatannya ada dua yaitu ada rekonvensi dan ada gugatan yang berdiri sendiri atau istri mau bercerai dengan suaminya dan suaminya menyetujui dengan syarat pembagian masalah harta bersama dalam hal ini bisa dikatakan bentuk gugatan tersebut termasuk dalam gugatan rekonvensi, adapun gugatan yang berdiri sendiri yaitu setelah bercerai ada akta cerai, dll. diajukan harta bersama.

10. Bagaimanakah dampak perceraian terhadap harta bersama?

Jawab: Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dalam Harta Bersama Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”** bernama lengkap Ema Febrianti, Nim: 10100114239, Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Menati, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1996 di

Bulukumba, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis Mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 36 Bontosunggu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2003-2008 sampai Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2008-2011, dengan tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikanya di SMA Negeri 7 Bulukumba Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2014. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2014, Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan mengambil Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan Peradilan Agama hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di tahun 2018. Selama menyandang status mahasiswa Penulis kader di MBH (Mahasiswa Berpendidikan Hukum) pada tahun 2017. Keinginan dan harapan terbesar dari Penulis yaitu dapat membahagiakan kedua orang tua serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat dan semoga ilmu yang di peroleh dapat berguna bagi bangsa dan Negara.